



Rencana Kerja **Tahun 2025**

**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR**



LAMPIRAN

Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 30 Tahun 2024
Tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2025

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR 2025



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2024



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

9

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
4. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
14. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
17. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025

19. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
26. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.


WALIKOTA DENPASAR,

IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2021-2026. Kami sangat menyadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025.

Akhir kata kami berharap agar Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.


Denpasar, 5 Agustus 2024
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar
Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196605251993031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI UMKM	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	43
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025	44
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	52
BAB V : PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran Tahun Keempat daripada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RENJA perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RENSTRA perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan RENJA ini berdasarkan pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini didalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2023 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2024. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan Koperasi dan UMKM, baik di Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun Nasional.

Tidak bisa dipungkiri, pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini mengingat populasi UMKM yang cukup besar, dan Koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat terbukti sebagai lembaga keuangan yang mampu bertahan dalam menghadapi tekanan dan krisis ekonomi akibat adanya pandemi yang melanda, walaupun dalam perkembangannya selalu mengalami tantangan dan persaingan dengan industri besar dan perdagangan lintas sektor dan wilayah.

Melihat besarnya jumlah Koperasi dan UMKM ini sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Strategi pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah tantangan digitalisasi di hampir semua aspek kehidupan, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap koperasi dan UMKM. Sehingga baik Koperasi maupun UMKM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dapat dilihat dari aspek harga, sisi kualitas dan kreatifitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan daya saing tersebut, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar fokus pada peningkatan produksi, pembiayaan, pemasaran, maupun peningkatan kualitas baik dari sisi kelembagaan maupun SDM pengelola koperasi dan Pelaku UMKM.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dijiwai oleh semangat Sewaka Darma dan komitmen untuk melakukan perubahan struktur sesuai dengan Visi dan Misi Kota Denpasar, berdasarkan hal tersebut, disusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2023 Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
24. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);
25. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;
26. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyempurnaan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good governance* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan Visi dan Misi.

Penyempurnaan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahun keempat daripada RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar pada tahun 2025 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi Renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab di Tahun Anggaran 2023, Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam Pelaksanaan TA. 2023, secara keseluruhan Program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan walaupun masih adanya silpa anggaran dari pelaksanaan kegiatan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan dimana capaian capaian fisik sebesar 98,89% sedangkan keuangannya realisasinya sebesar 94,12%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan target sudah dapat dipenuhi, meskipun dalam pertengahan tahun meningkatnya inflasi di Denpasar khususnya, dimana pelaksanaan kegiatan terus ditingkatkan dengan berbagai cara atau inovasi yang menyikapi daripada pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tercapai target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- Adanya pemberian bantuan Bahan Baku Produksi bagi pelaku UMKM
- Pelaksanaan Pelatihan bagi Pelaku UMKM dan Pengelola Koperasi
- Pelaksanaan Kegiatan Bazar untuk menekan laju inflasi di Daerah

Adapun Faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah :

- Adanya peningkatan Inflasi
- Pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan elektronik, yang mana terkendala oleh rekanan
- Adanya penerapan belanja yang harus barang berstatus PDN ataupun TKDN

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, dimana secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi atau adanya kesungguhan daripada para pengelola Koperasi maupun Pelaku UMKM untuk memajukan usahanya, sehingga otomatis dapat menimbulkan penumbuhan ekonomi secara makro. Yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan perekonomian di Kota Denpasar khususnya. Walaupun ditengah keadaan meningkatnya inflasi daerah yang mana keadaan ekonomi mengalami kelesuan atau daya beli masyarakat sangat kurang.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

- Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pengelola Koperasi dan UMKM serta pembinaan administrasi koperasi secara berkelanjutan.
- Secara bertahap memberikan informasi Perkembangan Pasar bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro.
- Mendorong pelaku UMKM dan Koperasi untuk ikut serta dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Denpasar

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11 = 10/4
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11 = 10/4
2	17	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	100	100	100	0	0	0
2	17	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11 = 10/4
2	17	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	100	100	100	100	0	0	0
2	17	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11 = 10/4
2	17	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/ operasional yang laik jalan dan kendaraan dinas / operasional yang layak digunakan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mebeleur kantor dengan kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	95%	85%	87%	40%	48%	90%	84%	90%
2	17	3	02.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	500	100	100	100	100	100	300	60%

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11 = 10/4
					dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
2	17	3	02.01	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	500	100	100	100	100	100	300	60%
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	38,48%	16,43%	21,94%	27,45%	125%	27,45%	27,45%	71%
2	17	4	02.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	750	150	150	150	150	150	450	60%
2	17	4	02.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	750	150	150	150	150	150	450	60%
2	17	4	02.01	3	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	80	0	0	0	0	0	0	0%
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	39,93%	24,51%	26,74%			31,13%	31,13%	78%

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11 = 10/4
2	17	5	02.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	900	180	240	280	117%	100	560	62%
2	17	5	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	900	180	240	280	117%	100	560	62%
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	12%	5%					5,00%	41,67%
2	17	6	02.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	50	10				10	20	40%
2	17	6	02.01	5	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan KUMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM KUMKM dan Kewirausahaan	1520	130	230	230	100	100	460	30%

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11 = 10/4
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	250 UMKM						0,00%	0,00%
2	17	7	01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	150						0	0%
2	17	7	01	01	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	150						0	0%
2	17	7	01	02	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5						0	0%
2	17	7	01	03	Koordinasi dan Sikronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5	1					0	0%

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11 = 10/4
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat omzet dan aset nya	5,00%	0,5	1%	1%	100	1,5%	1,5%	30,00%
2	17	8	02.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omsert dan aset nya	500		100	100	100	100	200	40%
2	17	8	02.01	6	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500		100	100	100	100	200	40%

2.1.1 Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2023, dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.380.000	70.380.000	100,00%
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	99.761.380	99.631.313	99,87%
				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	222.832.864	222.664.950	99,92%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	410.169.767	402.543.402	98,14%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	149.017.337	143.416.619	96,24%
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	622.084.186	619.454.550	99,58%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.159.475.306	4.883.177.393	94,64%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	100,00%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.471.980	5.500.500	84,99%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.926.146	99.090.390	84,75%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.391.640	28.584.700	97,25%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.120.000	24.120.000	100,00%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.250.000	2.025.000	90,00%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.903.000	91.516.415	72,12%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.535.550	15.077.800	77,18%
			Pengadaan	Pengadaan Mebel	23.454.528	23.200.000	98,91%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.616.238	118.756.000	75,35%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.415.213	38.059.400	89,73%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.000.000	93.807.947	65,14%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	817.022.770	815.522.244	99,82%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.220.000	178.165.150	75,74%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.130.000	100.290.000	97,25%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.000.000	196.992.000	99,49%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000	7.400.000	43,53%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
sampai dengan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Sektor Ekonomi	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	16,43%	21,94%	27,45%	32,97%	38,48%	19,29%	27,78%
		Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset Usaha Mikro	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	0,5%	1%

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
sampai dengan Tahun 2023

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	Persentase Koperasi Aktif	%	85%	87%	90%	93%	95%	85%	40%
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	99,10%	99,10%	99,50%	99,50%	99,50%	99,10%	99,10%

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi, capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 2.5 dibawah ini :

Sasaran 1
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Tahun 2023
Persentase Koperasi sehat	21,94%	19,29%	27,78%	126,63%

Pada indikator Persentase koperasi sehat meningkat mencapai realisasi sebesar 27,78% capaiannya yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 21,94%. Dimana hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi di tahun 2023 sudah menunjukkan perkembangan yang baik, walaupun dimana masih adanya inflasi dan kenaikan harga

BBM. Selain hal tersebut juga adanya pendapatan atau keuntungan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, yang mana keuntungan atau laba bersih yang diperoleh oleh koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pencapaian persentase koperasi sehat, dilakukan dengan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan, di dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pengelola koperasi. Pembinaan dilakukan baik dengan langsung ke koperasi ataupun dengan mengikut sertakan para pengelola koperasi melalui Pendidikan atau Bimtek – Bimtek yang berkaitan langsung dengan pengetahuan tata cara pengelolaan koperasi yang sesuai dengan jati diri, sehingga dapat diketahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Dimana dalam pelaksanaan Pelatihan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
2. Pengawasan, untuk meningkatkan kinerja koperasi pengawasan sangatlah penting dilaksanakan dimana akan menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi dan akan meningkatkan perekonomian daerah, dimana akan mengurangi risiko dari investasi ilegal yang merugikan masyarakat yang mengatasnamakan koperasi. Pengawasan berkelanjutan bertujuan agar koperasi tidak keluar dari koridor jati diri koperasi.
3. Penyediaan informasi pasar, untuk menghadapi permasalahan terbatasnya akses permodalan. Dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku Koperasi dengan kalangan Perbankan, Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku koperasi. Dimana Dinas Koperasi turun secara langsung ke Koperasi menyampaikan informasi Permodalan dimana koperasi yang membutuhkan permodalan dapat mengajukan

lewat KUR maupun ke LPDB-Kemenkop UKMRI. Dalam penyediaan informasi pasar Dinas Koperasi UMKM mengajak koperasi yang anggotanya mempunyai produk unggulan diikutsertakan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dinas Koperasi UMKM menggandeng plafon – plafon Digital untuk bekerjasama dengan koperasi yang akan meningkatkan volume usaha koperasi itu sendiri, atau dengan anggota koperasi.

Sasaran 2
Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Tahun 2023
Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	1,00%	0,50%	1,00%	100%

Pada indikator Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1%, adapun hal – hal yang dilakukan untuk pencapaian daripada target sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan melakukan pembinaan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan bagi para Pelaku Usaha Mikro selain difokuskan dalam hal untuk peningkatan kuantitas produk juga dilaksanakan untuk peningkatan kualitas SDM bagi UMKM tersebut. Pembinaan dilakukan selain dengan turun kelapangan Pelaku UMKM di berikan Pelatihan – pelatihan juga sosialisasi tentang kelembagaan UMKM, dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan serta peningkatan kuantitas produk sehingga dapat meningkatkan omset penjualan, secara tidak

langsung akan meningkatkan perekonomian dari pelaku UMKM maupun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.

2. Penyediaan Informasi pasar, Perkembangan UMKM membutuhkan adanya jaringan kemitraan antar lembaga sehingga akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil UMKM cepat bisa diketahui. Membangun kemitraan antara UMKM serta pengusaha besar akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha UMKM. Pengusaha besar mempunyai kewajiban untuk menjadi mitra bagi para pelaku UMKM. Wirausaha dibidang UMKM akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah dalam hal terbatasnya akses permodalan. Terlebih lagi pelaku usaha UMKM di sektor informal, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya. Dimana Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku UMKM dengan kalangan Perbankan, Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku UMKM. Dalam pemasaran produk hasil UMKM dilakukan baik dalam ajang Lokal maupun Nasional.

Untuk lebih meningkatkan informasi pasar bagi UMKM telah dilakukan dengan berbagai langkah antara lain :

- a. Peningkatan Kemitraan. Kemitraan yang dilaksanakan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi maupun penjualan, dimana dalam hal untuk memenuhi bahan baku produksi ataupun melakukan hubungan kerjasama saling bertukar produk yang dihasilkan. Dengan harapan dapat meningkatkan penjualan ataupun menekan biaya produksi secara signifikan dari bahan baku yang diperolehnya.
- b. Pameran Dalam maupun Luar Daerah, dalam rangka lebih memperkenalkan produk UMKM yang dihasilkan dilakukan dengan mengikutsertakan UMKM binaan dalam ajang promosi baik di dalam Pameran tingkat lokal juga dilaksanakan dalam ajang nasional. Dengan tujuan lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan, dimana agar para UMKM lebih meningkatkan kualitas

dari produk yang dihasilkan agar lebih dapat dikenal oleh masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Hal Kritis terkait Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan program kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan kebijakan dibidang kelembagaan koperasi, pengawasan, pembiayaan, produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan Koperasi dan UMKM;
4. Memberikan pelayanan proses pengesahan Badan Hukum Koperasi, Nomor Induk Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Pembukaan Kantor Cabang Koperasi, Kantor Kas Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar Koperasi mendapat legalitas.

2. Permasalahan Dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UMKM.

Beberapa permasalahan masih akan dihadapi oleh koperasi dan UMKM dalam tahun 2025. Secara umum Koperasi dan UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian NSPR, SPM, SDGs

Dampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Kemampuan Koperasi dan UMKM yang berkembang saat ini belum cukup merata kepada seluruh Koperasi dan UMKM, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar Koperasi dan UMKM terutama kredit investasi.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Koperasi UMKM

Disamping permasalahan – permasalahan permodalan dan pemasaran tersebut pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2025 juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka itu perlu didorong pertumbuhan UMKM melalui peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil pada sumber daya unggulan.

5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan identifikasi terhadap koperasi – koperasi yang kurang aktif, untuk kemudian dilakukan kegiatan Restrukturisasi kelembagaan dan usaha serta Pengawasan koperasi melalui Monitoring koperasi maupun Supervisi kinerja koperasi dalam hal penataan organisasi, badan hukum, tata laksana koperasi agar koperasi – koperasi tersebut dapat aktif kembali. Sedangkan bagi koperasi yang benar – benar tidak aktif diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk ditindaklanjuti dilakukan pembubaran.
- b) Memperkuat kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM sesuai dengan standart kompetensi.
- c) Pengembangan Inovasi dalam rangka pemasaran produk melalui Digital marketing yang akan meningkatkan inovasi atau omset daripada Koperasi dan UMKM itu sendiri.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat

atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Denpasar

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				16.149.212.150	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				12.939.607.422	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100,00%	11.048.984.322	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100,00%	11.048.984.322	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Dokumen	131.975.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Dokumen	141.150.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.825.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	141.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	126.150.000	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	7.682.308.016	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	7.304.316.838	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.682.308.016	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.304.316.838	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Denpasar	jumlah layanan administrasi Kepegawaian yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	152.700.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Denpasar	jumlah layanan administrasi Kepegawaian yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	0	
	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Kota Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	56.700.000	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Kota Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	0	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Denpasar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	96.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Denpasar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	538.922.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	376.656.350	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	5.851.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	5.840.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	138.005.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	138.777.350	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	37.740.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	28.717.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	25.668.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	25.668.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	8.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsul	100%	293.232.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsul	100%	164.054.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	30.426.950	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	9.600.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	649.344.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	583.521.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	185.844.000	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	183.036.000	
	Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	463.500.000	Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	355.485.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	1.193.633.356	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	737.316.244	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	38.381.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	31.501.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	100%	140.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	100%	146.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Listrik yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1.014.851.856	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1.014.851.856	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100%	700.101.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100%	630.030.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	335.241.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	300.930.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	27.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	8.600.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	64.860.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	64.860.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	255.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	228.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	18.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	27.340.000	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Denpasar	Persentase Koperasi Aktif	90,00%	1.849.141.108	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Denpasar	Persentase Koperasi Aktif	93,00%	1.090.843.830	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi	1.849.141.108	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi	1.090.843.830	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	70 Koperasi	1.591.009.507	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Koperasi	142.113.035	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Koperasi	258.131.601	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Koperasi	948.730.795	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Denpasar	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	27,45%	597.481.560	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Denpasar	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	32,97%	435.276.400	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Unit Usaha	597.481.560	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Unit Usaha	435.276.400	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	178.928.560	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	79.549.400	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	418.553.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	355.727.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Denpasar	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	9,00%	595.238.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Denpasar	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	11,00%	236.823.000	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha	595.238.400	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha	236.823.000	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	200 Unit Usaha	595.238.400	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	200 Unit Usaha	236.823.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Denpasar	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	25,00%	225.995.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Denpasar	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	25,00%	78.205.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Denpasar	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	30 Unit Usaha	225.995.500	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Denpasar	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	30 Unit Usaha	78.205.000	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	22.545.500	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	17.775.000	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	21.627.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	19.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	40.530.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	40.530.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	80 Unit Usaha	141.293.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	80 Unit Usaha	0	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Denpasar	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	4,00%	1.360.914.260	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Denpasar	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	25,00%	1.370.468.760	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Denpasar	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omset dan aset nya	100 Unit Usaha	1.360.914.260	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Denpasar	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omset dan aset nya	100 Unit Usaha	1.370.468.760	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kota Denpasar	Jumlah Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	9 Unit Usaha	475.122.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kota Denpasar	Jumlah Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	9 Unit Usaha	475.122.000	
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dalam Inkubator Wirausaha	100 Unit Usaha	362.392.000	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dalam Inkubator Wirausaha	100 Unit Usaha	371.946.500	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	523.400.260	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	523.400.260	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Hasil pengumpulan informasi di lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi usulan – usulan program/kegiatan dari masyarakat,
- b. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
- c. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besarnya volume kegiatan;
- d. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan SKPD;
- e. Memeriksa usulan program/kegiatan sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- f. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan dimana dalam Tahun 2024 belum ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2025. Begitu juga dalam pelaksanaan reses DPRD melalui E Pokir tidak terdapat usulan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi UMKM baik dalam hal pembinaan Koperasi maupun UMKM yang tentunya merupakan aspirasi daripada masyarakat yang disalurkan lewat anggota DPRD yang tentunya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Denpasar.

Adapun usulan yang terkait dengan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Denpasar

No	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta seluruh stakeholders untuk mendapatkan suatu input rencana pembangunan prioritas yang bertitik tolak dari permasalahan serta hambatan-hambatan yang ada, dalam pengembangan rencana program di daerah diperlukan harmonisasi terkait penyelenggaraan pembangunan untuk sinergitas antara lembaga pusat dan daerah.

Selain itu, faktor permasalahan dalam pelayanan institusi dalam pengembangan Koperasi dan UMKM belum sepenuhnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang mengarah langsung terhadap Kelompok usaha ekonomi produktif yang ada di daerah pedesaan serta embrio Koperasi untuk kesejahteraan anggotanya dan masyarakat setempat, hal ini kedepan merupakan prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2025 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita-cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai, maka tujuan dan sasaran Renja merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintah namun berdasarkan pada kriteria-kriteria dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat. Adapun

Tujuan yang ingin di capai yaitu : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi

Pencapaian sasaran agar efektif harus bersifat spesifik, dapat dilaksanakan, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil. Adapun sasaran yang hendak dicapai :

- 1) Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas
- 2) Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2025
1	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	Persentase Koperasi sehat	32,97%
		Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	2%

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program / kegiatan dalam tahun 2025 guna mencapai visi dan misi Walikota bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah menetapkan tujuan dan sasaran guna meningkatkan perkembangan koperasi dan UMKM.

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Koperasi UMKM
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Denpasar

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				12.939.607.422				14.233.568.164
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Kota Denpasar	100,00%	141.150.000			100,00%	14.233.568.164
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kota Denpasar	2 Dokumen	141.150.000			2 Dokumen	155.265.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	2 Dokumen	141.150.000	PAD	Sekretariat	2 Dokumen	141.150.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Kota Denpasar	100%	7.304.316.838			100%	8.034.748.522
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	100%	7.304.316.838	DAU dan PAD	Sekretariat	100%	8.034.748.522

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Kota Denpasar	100%	376.656.350			100%	414.321.985
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	5.840.000	PAD	Sekretariat	100%	6.424.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	138.777.350	PAD	Sekretariat	100%	152.655.085
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	28.717.000	PAD	Sekretariat	100%	31.588.700
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	25.668.000	PAD	Sekretariat	100%	28.234.800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	100%	4.000.000	PAD	Sekretariat	100%	4.400.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	100%	164.054.000	PAD	Sekretariat	100%	180.459.400
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Denpasar	100%	9.600.000	PAD	Sekretariat	100%	10.560.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Denpasar	100%	538.521.000			100%	592.373.100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	183.036.000	PAD	Sekretariat	100%	201.339.600
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	355.485.000	PAD	Sekretariat	100%	391.033.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Kota Denpasar	100%	737.316.244			100%	811.047.868
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar	100%	31.501.000	PAD	Sekretariat	100%	34.651.100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	146.400.000	PAD	Sekretariat	100%	161.040.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	559.415.244	PAD	Sekretariat	100%	615.356.768
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kota Denpasar	100%	630.030.000			100%	693.033.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar	100%	300.930.000	PAD	Sekretariat	100%	331.023.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Denpasar	100%	8.600.000	PAD	Sekretariat	100%	9.460.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar	100%	64.860.000	PAD	Sekretariat	100%	71.346.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar	100%	228.300.000	PAD	Sekretariat	100%	251.130.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar	100%	27.340.000	PAD	Sekretariat	100%	30.074.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Kota Denpasar	93,00%	1.090.843.830			95,00%	1.199.928.213
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	Kota Denpasar	100 Koperasi	1.090.843.830			100 koperasi	1.199.928.213
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Denpasar	100 Koperasi	142.113.035	PAD	Bidang Pengawasan	100 Koperasi	156.324.339
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Denpasar	100 Koperasi	948.730.795	PAD	Bidang Pengawasan	100 Koperasi	1.043.603.875

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	Kota Denpasar	32,97%	435.276.400			38,48%	478.804.040
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	Kota Denpasar	150 Unit Usaha	435.276.400			150 Unit Usaha	478.804.040
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kota Denpasar	150 Unit Usaha	79.549.400	PAD	Bidang Pengawasan	150 Unit Usaha	87.504.340
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kota Denpasar	16 Unit Usaha	355.727.000	PAD	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	16 Unit Usaha	391.299.700
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Kota Denpasar	11,00%	236.823.000			12,00%	260.505.300
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	Kota Denpasar	10 Unit Usaha	236.823.000			10 Unit Usaha	654.762.240
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Denpasar	200 Unit Usaha	236.823.000	PAD	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	200 Unit Usaha	654.762.240

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	Kota Denpasar	25,00%	78.205.000			150 UMKM	248.595.050
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Kota Denpasar	30 Unit Usaha	78.205.000			30 Unit Usaha	86.025.500
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Denpasar	30 Unit Usaha	17.775.000	PAD	Bidang Pemberdayaan UMKM	30 Unit Usaha	19.552.500
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kota Denpasar	60 Unit Usaha	19.900.000	PAD	Bidang Pemberdayaan UMKM	60 Unit Usaha	21.890.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Denpasar	100 Unit Usaha	40.530.000	PAD	Bidang Pemberdayaan UMKM	100 Unit Usaha	44.583.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	Kota Denpasar	20,00%	1.370.468.760			25,00%	1.507.515.636
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omsert dan aset nya	Kota Denpasar	100 Unit Usaha	1.370.468.760			100 Unit Usaha	1.507.515.636

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Kota Denpasar	9 Unit Usaha	475.122.000	PAD	Bidang Kewirausahaan	9 Unit Usaha	522.634.200
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dalam Inkubator Wirausaha	Kota Denpasar	120 Unit Usaha	371.946.500	PAD	Bidang Kewirausahaan	100 Unit Usaha	409.141.150
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kota Denpasar	100 Unit Usaha	523.400.260	PAD	Bidang Pemberdayaan UMKM	100 Unit Usaha	575.740.286

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Rencana kerja Dinas Koperasi dalam Tahun 2025 tetap mengacu pada menjadi Sasaran dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan maupun peningkatan produktivitas dari pada koperasi dan UMKM itu sendiri.

Untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang sebagaimana telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Dinas Koperasi UMKM pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.12.939.607.422 yang mana akan dipergunakan oleh Sekretariat maupun Bidang yang ada pada Dinas Koperasi UMKM dalam menunjang urusan Pemerintahan dalam hal pelayanan kesekretariatan dan Pelayanan Kepada Koperasi dan UMKM, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintahan			12.939.607.422
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			12.939.607.422
	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah			12.939.607.422
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	9.727.990.432
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Dokumen	141.150.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	141.150.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	7.304.316.838
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	7.304.316.838
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	376.656.350
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	5.840.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	138.777.350
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	28.717.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	25.668.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	4.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	164.054.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9.600.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	538.521.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	183.036.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	355.485.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	737.316.244
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	31.501.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	146.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	559.415.244
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100%	630.030.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	300.930.000

	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	8.600.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	64.860.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	228.300.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	27.340.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	93,00%	1.090.843.830
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi	1.090.843.830
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	100 Koperasi	142.113.035
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Koperasi	948.730.795
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	32,97%	435.276.400
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	435.276.400
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	79.549.400

	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	355.727.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	11%	236.823.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan restrukturisasi usaha	10 Unit Usaha	236.823.000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Unit Usaha	236.823.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	25%	78.205.000
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	30 Unit Usaha	78.205.000
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	17.775.000
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	19.900.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	40.530.000

	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	20%	1.370.468.760
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omset dan asetnya	100 Unit Usaha	1.370.468.760
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Pemula menjadi Wirausaha Mapan	9 Unit Usaha	475.122.000
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi dalam Inkubator Wirausaha	120 Unit Usaha	371.946.500
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	523.400.260
TOTAL				12.939.607.422

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2025
1	Persentase Koperasi sehat	%	32,97%
2	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	%	2%
3	Persentase Koperasi Aktif	%	93%
4	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	99,5%

BAB V

PENUTUP

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan. Peran Dinas Koperasi dan UMKM akan difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat sebagai lapangan bermain bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, serta memberikan dukungan perkuatan bagi koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah hanya sebagai stimulan program.

Dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar melaksanakan 6 (Enam) program dengan 11 (Sebelas) kegiatan dengan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.939.607.422,-

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Program Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini merupakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada periode tahun 2025. Rencana Program ini hanya merupakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan.

Denpasar, 5 Agustus 2024
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar

Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196605251993031010



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2693/ HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :

- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2025;
- b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2025;
- d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2025;
- e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2023

an. Walikota Denpasar,

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
Dan Menengah Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19660525 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua DPRD Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023
NOMOR : 188.45 / 2693 / HK / 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Bina Lembaga pada Koperasi pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
3. Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
5. Kasubag Keuangan pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
7. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, yaitu :
1. I Gusti Ngurah Agung Sastrawan, SE., MM.
2. Ida Bagus Mayun Antara, SH.
3. Anak Agung Rai Agung Kusuma Dewi, SE., M.Si.
4. Ida Bagus made Ari Chandra Gupta, SP., M.Si
5. Anak Agung Ayu Anom kartika Dewi, SE.

Staf Administrasi : Staf pada Sekretariat Dinas Koperasi UMKM Kota
Denpasar sebanyak 2 orang, yaitu :

1. I Gede Umbu Bhakti, S.Tr.IP.
2. I Wayan Witayasa, SH.

an. Walikota Denpasar,

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
Dan Menengah Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19660525 199303 1 010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
 Jln. Malawarman No. 3 Denpasar, Telpun (0361) 416375, Fax (0361) 424382
 Website: koperasidenpasarkota.go.id e-mail: koperasidenpasarkota@gmail.com

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2023 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 11 Juli 2024
 Kepala Dinas Koperasi UMKM

 Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196605281993031010



ប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kota Denpasar telah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar	Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025 sudah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar tahun 2025
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah sudah mengacu pada perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran Pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

Denpasar, 16 Juli 2024
Kepala Bappeda Kota Denpasar

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi